

Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Politik Luar Negeri Indonesia

Oleh:
Ratna Shofi Inayati

Abstract

In his early presidential time President SBY took a series of visits to Australia, New Zealand and East Timor following his visit to Malaysia and Singapore a month before as his first step to start the Indonesian Diplomacy. In the next step, he also prepare to visit US and EU during May 2005. It indicates that President SBY still continues the basic strategy in the implementation of Indonesian Foreign Policy by President Megawati. Since the New Order government, Indonesia has adopt the Concentric Circle Formula as the base theory in the implementation of Indonesian Foreign Policy, putting emphasis on relation with countries within a series of concentric circles. The first concentric circle is ASEAN which is regarded as the corner stone of Indonesian foreign policy. The second circle, Indonesia puts a special emphasis on promoting relations with it's Eastern and Southern neighbour, bringing Indonesian engagement with the Pacific Islands Forum, The South West Pacific Dialogue and the Tripartite Consultation between Indonesia, Australia and East Timor. Within the second concentric circle also includes Japan, China and South Korea in the ASEAN +3 forum. Beyond that, Indonesia puts in important attention to the relation with its major economic partners as US and EC, as regarded as the third concentric circle.

Politik luar negeri Indonesia ditujukan untuk melindungi kepentingan nasional, khususnya rencana pembangunan nasional. Ditengah perkembangan dunia yang ditandai oleh saratnya kepentingan nasional masing-masing negara dalam proses negosiasi di tingkat bilateral, regional maupun multilateral maka semakin penting bagi Indonesia untuk menentukan sikap dan menempatkan posisi yang tepat dan jelas. Jika tidak, kita akan terombang-ambing di antara pergumulan kepentingan yang saling bertolak belakang. Target jangka pendek dan jangka panjang yang hendak dicapai perlu ditetapkan terlebih dahulu secara jelas sehingga biaya dan manfaatnya bisa lebih terukur dan transparan. Yang lebih penting lagi adalah bagaimana mengkaitkan startegi dan kebijakan pembangunan ekonomi nasional dengan langkah-langkah yang ditempuh di tingkat internasional.

Sejak pemerintahan Orde Baru, politik luar negeri Indonesia menganut teori lingkaran

konsentris (*Concentric Circles Formula*). Lingkaran Konsentris pertama adalah ASEAN yang dianggap sebagai “corner stone” dari politik luar negeri Indonesia.

Di luar lingkaran tersebut, Indonesia perlu memperkuat kerja sama dengan negara-negara yang tergabung dalam *Pacific Island Forum*, *the South West Pacific Dialouge* dan Konsultasi Tripartite diantara Indonesia, Australia dan Timor Timur yang mencakup wilayah dalam Lingkaran Konsentris II. Termasuk di dalam lingkaran konsentris II adalah negara-negara yang tercakup dalam kerja sama ASEAN+3 (Jepang, China dan Korea Selatan). Diluar lingkaran tersebut, Indonesia mengkonsentrasikan kerja sama dengan negara-negara yang ekonominya maju seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa.¹

¹ Dewi Fortuna Anwar, “*Indonesian Foreign Policy and Domestic Politics*”, ISEAS, Singapore, 2003, h.7

Dukungan sepenuhnya akan peran sentral PBB dan prinsip-prinsip multilateralisme di dalam upaya mengatasi perdamaian dan keamanan dunia merupakan aspek penting lainnya dari politik luar negeri Indonesia. Hal ini sangat jelas ditunjukkan dengan penolakan langkah-langkah unilateral AS dan Inggris di dalam mengatasi krisis di Irak.

Seperti halnya Suharto, Megawati dalam menata pelaksanaan politik luar negeri tidak berusaha mencitrakan dirinya tetapi memberikan peran utama kepada Menteri Luar Negeri. Hal ini berbeda dengan ketiga presiden sebelumnya yaitu Soekarno, BJ Habibie dan Gus Dur dimana pelaksanaan politik LN lebih menonjolkan peran presiden.

Langkah yang diambil mantan Presiden Megawati masih dipertahankan oleh Presiden SBY, tetapi sebagaimana kemunculannya sebagai kandidat Presiden yang sukses, SBY berusaha menggunakan karisma pribadinya dengan mengambil sebagian peran Menlu di dalam melakukan pendekatan dengan setiap mitra dialog guna memperoleh kepercayaan mereka akan keseriusan SBY di dalam memenuhi setiap komitmennya.

Politik luar negeri pada masa pemerintahan SBY 2004-2009 menghadapi beberapa kondisi, antara lain :

- 1) Terbatasnya kemampuan nasional dalam mengatasi krisis ekonomi, yang telah menyulut dan mempertajam konflik sosial dan politik di berbagai wilayah di tanah air, sehingga mobilitas dukungan ekonomi internasional merupakan hal yang mutlak perlu diupayakan/dilakukan pemerintahan SBY. Indonesia harus secepatnya mengupayakan iklim yang kondusif guna menarik kembali investasi asing yang enggan masuk a.l. karena ketidakpastian hukum di Indonesia.
- 2) Indonesia harus mencegah mispersepsi internasional tentang gerakan terorisme internasional yang belakangan marak di negeri ini dan terus mengupayakan

dukungan dari dunia luar demi keutuhan negara dan bangsa dari berbagai ancaman separatisme dan masalah otonomi daerah. Politik luar negeri memainkan peran penting guna mencegah internasionalisasi isu-isu separatisme dan menegaskan dukungan internasional terhadap integritas wilayah Indonesia serta memelihara kepercayaan kepada aktor utama politik dan keamanan di kawasan.

- 3) Posisi kuat Indonesia di kawasan dalam memainkan peran di ASEAN dipertahankan demi tetap mempertahankan posisi tawar dan meningkatkan kerja sama serta dukungan internasional. Indonesia harus berperan mendukung pembentukan suatu komunitas regional untuk kawasan Asia Pasifik yang diperkuat ASEAN melalui pengakuan mereka terhadap suatu tertib kawasan (sebagaimana yang tertuang dalam TAC). Di bidang politik keamanan dengan ASEAN Regional Forum (ARF) dan dari segi ekonomi melalui APEC yang merupakan mekanisme institusi-institusi pembentukan komunitas. Keduanya didukung second track masing-masing, yaitu CSCAP dan PECC.
- 4) Kepiawaian berdiplomasi dalam era globalisasi tidak akan mampu meningkatkancitra suatu negara apabila kondisi dalam negeri tidak kondusif. Karena itu, penyusunan skala prioritas untuk mengoptimalkan sumber daya yang terbatas, terutama upaya pemulihan ekonomi dan pemeliharaan lingkungan nasional dan regional yang aman dan stabil sangat diperlukan pada pemerintahan ini.

Kondisi Dalam Negeri

Krisis ekonomi 1997 yang ditandai oleh pelarian arus modal asing dari Indonesia telah membawa negeri ini ke arah keterpurukan dan kita akan sulit untuk bangkit kembali apabila tidak tanggap terhadap perkembangan yang

terjadi baik di luar maupun di dalam negeri. Kita harus memaksimalkan peluang dengan memanfaatkan hal-hal yang positif, sekaligus mengatasi kendala baik yang berasal dari luar ataupun dalam negeri. Untuk dapat memanfaatkan peluang yang ada diperlukan penanganan yang serius dengan strategi yang tepat serta koordinasi yang efektif dengan melibatkan berbagai komponen pemerintah, swasta, LSM dan akademisi.

Pasca krisis ekonomi 1997, arus modal masuk diharapkan akan terjadi kembali setelah restrukturisasi utang baik di sektor pemerintah maupun swasta, dan kepercayaan kreditor kepada debitornya pulih kembali. Meskipun sampai sekarang *current account* masih positif yang berarti masih ada *net capital inflow* akan tetapi hal ini sulit untuk diketahui secara pasti karena bisa tersembunyi pada kesalahan pencatatan di neraca pembayaran yang angkanya besar.

Meskipun surplus modal di dunia masih cukup besar namun yang bisa tertarik ke Asia Tenggara hanya sebagian kecil saja. Korea Selatan sudah mulai menarik pemasukan modal dan modal portfolionya kembali ke Thailand, akan tetapi modal investasi langsung (*direct foreign investments*) nya masih lebih tertarik ke China ketimbang Asia Tenggara.

Laju pertumbuhan ekonomi nasional juga sangat tergantung dari integrasinya terhadap ekonomi global dan regional. Faktor dinamis yang mendorong ekonomi tersebut adalah teknologi informasi dan arus globalisasi (integrasi ekonomi dunia yang mengikuti tata tertib WTO). Indonesia sudah menjadi bagian dari proses globalisasi ekonomi dunia tersebut walaupun di dalam negeri masih cukup banyak sektor dan golongan usaha yang merasa cemas dan minta proteksi. Secara internal target reformasi dalam negeri dalam bentuk deregulasi dan *good governance* terus diupayakan perwujudannya. Dalam prakteknya, faktor eksternal dan internal tersebut akan berinteraksi dalam suatu dinamika yang saling mempengaruhi sehingga perlu dilihat

dalam konteks yang terintegrasi. Satu hal yang perlu dicermati bahwa saling ketergantungan dan interaksi ini akan semakin meningkat pada tahun-tahun mendatang, dan masa depan kita tergantung kepada bagaimana kita dapat bersikap positif namun waspada terhadap perkembangan di luar.

Dalam alam demokrasi dan desentralisasi pada masa pemerintahan presiden SBY saat ini akan timbul lebih banyak sentra kekuasaan, yang walaupun lebih kecil namun dapat menjadi sumber KKN baru. Visi dan misi pemerintahan presiden SBY adalah pemberantasan korupsi secara tuntas yang membelit di semua departemen. Hal ini harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh pihak aparat hukum baik di pusat maupun di daerah. Saat ini pemerintah sedang mengusut tuntas dugaan korupsi di KPU dan beberapa Bank BUMN. Mantan gubernur Aceh Abdulah Puteh juga sedang dalam peradilan sebagai tersangka korupsi.

Kebijakan otonomi daerah secara nominal harus dapat ikut menaikkan laju pertumbuhan ekonomi nasional, karena pusat pertumbuhan ekonomi demikian tidak akan berkonsentrasi di Jakarta lagi. Ada empat provinsi yang mempunyai potensi antara lain Riau, Kalimantan Timur, Aceh dan Papua serta daerah-daerah yang infrastruktur dan SDM nya relatif baik seperti Jawa Barat, Jakarta; Jawa Timur; Sumatra Utara; Sulawesi Selatan dll. Namun masalah illegal logging dan penyelundupan TKI di daerah perbatasan Indonesia – Malaysia sampai saat ini sulit untuk diberantas. Aparat di daerah perbatasan dan Pemda harus membenahi masalah ini sampai tuntas meskipun sulit karena sebagian dari mereka sendiri diduga ikut terlibat. Pemerintah harus terus mengupayakan penyelesaian masalah yang rumit ini.

Kunjungan kerja Presiden ke Malaysia dan Singapura pada bulan Februari yang lalu merupakan perwujudan komitmen pemerintah tentang langkah konkret yang harus diambil, jadi bukan sekedar janji belaka. Dengan pemerintah

Malaysia dibicarakan masalah perjanjian tentang TKI, yakni perlunya pemerintah Indonesia dan Malaysia mempunyai komitmen bersama untuk memperbaiki sistem ketenagakerjaan.² Sementara mengenai perjanjian ekstradisi dengan Singapura, Presiden SBY menjelaskan bahwa pemerintah Singapura mempunyai kepentingan untuk membersihkan nama negaranya agar tidak lagi disebut sebagai *safe heaven* bagi pelaku tindak pidana korupsi. Presiden mengharapkan tidak ada lagi koruptor yang sembunyi dan *enjoy life* di Singapura. PM Singapura menyampaikan komitmennya untuk mempercepat proses penyusunan MOU ekstradisi dengan Indonesia yang tertunda selama 31 tahun.³ Selanjutnya kunjungan Presiden SBY ditindak lanjuti oleh kunjungan Wapres Yusuf Kalla ke Malaysia dan Singapura beberapa waktu lalu. Kunjungan tersebut diharapkan akan membawa angin segar bagi hubungan kedua negara serta penyelesaian secara tuntas masalah-masalah tersebut.

Kebijakan apapun yang bakal diambil Indonesia, nampaknya masalah inti yang dihadapi adalah bagaimana memperkuat *home front* sehingga seluruh potensi yang dimiliki bisa dieksploitasi secara optimal. Kunci dari penguatan *home front* ini adalah bagaimana membentuk dunia usaha yang tangguh sehingga mampu menghadapi berbagai gejolak dan perubahan di lingkungan internasional. Kondisi demikian dapat terbentuk jika tercipta iklim dan lingkungan yang kondusif bagi industri nasional, dan merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah untuk mewujudkannya. Pengusaha yang tangguh akan muncul jika lingkungan industrinya mampu mengeliminasi praktek-praktek yang antikompetisi, diskriminatif dan tidak transparan. Sangat sulit membayangkan

munculnya produk-produk industri yang berdaya saing tinggi kalau bentuk pasarnya penuh monopoli dan oligopoli tanpa didukung oleh lingkungan yang kondusif di bidang keamanan, kepastian hukum, hubungan yang adil diantara produsen dan pekerja serta birokrasi yang bebas KKN.

Di tengah keadaan seperti saat ini, maka wajar apabila para pengusaha menghadapi situasi yang riskan untuk menerapkan visi jangka panjang didalam melakukan investasinya, di samping karena kondisi perekonomian yang masih sangat rentan terhadap berbagai gejolak internal dan eksternal. Pada akhirnya kita tidak tahu bagaimana bersikap dan menentukan posisi di tengah arus globalisasi. Dalam kondisi seperti itu maka kiranya sangat penting untuk merumuskan kembali peranan pemerintah agar meningkatnya peran swasta tidak menjadikan posisi pemerintah menjadi semakin tenggelam, melainkan justru semakin strategis dengan kebijakan yang tepat bagi semua pihak.

Lingkungan Internasional

Sebagai negara ASEAN terbesar, Indonesia mempunyai peranan kunci di dalam upaya pengembangan ASEAN. Suatu negara Indonesia yang stabil dan makmur akan memberikan manfaat bagi negara tetangganya. Demikian pula sebaliknya Indonesia yang miskin dan tidak aman akan mempengaruhi stabilitas kawasan.

Kerja sama regional ASEAN yang kuat memerlukan peran aktif kepemimpinan Indonesia. Selama beberapa tahun terakhir ini, Indonesia telah tersandera secara internal oleh permasalahan domestiknya. Sebelum tahun 1997, selama tiga dekade Indonesia memfokuskan diri dalam pembangunan ekonomi, mempererat hubungan persahabatan dengan negara-negara tetangga serta membangun iklim saling percaya dan kerja sama di lingkungan ASEAN.

Akan tetapi sejak tahun 1997, Indonesia mengalami suatu perubahan yang drastis dimana perekonomian yang kolaps secara mendadak

² Indonesia diharapkan dapat memperbaiki system rekrutmen dan pengiriman tenaga kerjanya ke Malaysia, sementara Malaysia berkepentingan untuk menegakkan hukum agar tidak ada perusahaan Malaysia yang memperkejakan tenaga kerja ilegal, karena merugikan pemerintah Malaysia dan pelanggaran hukum.

³ Detikcom, 9 April 2005

telah memicu suatu pergolakan sosial dan ketidakpastian politik. Namun demikian, sejak beberapa tahun terakhir ini Indonesia berhasil memulihkan stabilitas politik dan kembali ke jalur pemulihan perekonomiannya.

Dengan keberhasilannya menyelenggarakan Pemilihan langsung Presiden pada akhir Oktober 2004 yang lalu, Indonesia telah berhasil mencapai tonggak utama (*major milestone*) dalam proses transisi di bidang politik.

Pemerintahan Indonesia yang baru, di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Yusuf Kalla memiliki mandat untuk melakukan perubahan yang sulit guna mengembalikan pemerintahan ke jalur yang benar. Indonesia telah melakukan langkah perubahan yang signifikan di bidang finansial. Indikator makroekonomi yang menunjukkan kestabilan beberapa tahun terakhir ini akhirnya dapat melepaskan ketergantungan kita terhadap IMF pada bulan Desember 2003. Badan pemeringkat utang internasional telah menaikkan rating utang internasional Indonesia sehingga pemerintahan yang baru dapat memfokuskan diri pada upaya guna menarik investasi asing (LN) dan menggerakkan roda perekonomian Indonesia.

Dalam upaya memulihkan perekonomian nasional di tengah gelombang globalisasi ini, politik luar negeri Indonesia perlu difokuskan pada kerja sama bilateral dengan negara-negara Asia Timur, ASEAN+3 (Jepang, Korea Selatan, dan China), *East Asia Community* dan APEC pada tingkat regional, serta kelompok-kelompok tertentu pada tingkat global.

Hubungan bilateral dengan Jepang semakin meningkat dan momentum itu diperkuat dengan kunjungan Presiden SBY ke Jepang. Investasi, perdagangan dan kerja sama ekonomi bilateral maupun regional semakin diperluas dan diperdalam. Sudah saatnya Indonesia menandatangani Kesepakatan Kemitraan Ekonomi (*Economic Partnerships Agreement*) dengan Jepang di saat negara-

negara lain seperti Malaysia, Singapura dan Thailand sudah lebih dulu melakukannya.

Sementara hubungan bilateral dengan Korea Selatan penting bagi penataan ulang industri nasional yang setengah hancur melalui kerja sama teknologi madya dan tinggi yang dimiliki negara ini.⁴

Sebagai negara yang sedang bangkit, China merupakan mitra dagang dan pasar utama produk Indonesia melalui penyediaan berbagai bidang bahan baku yang diperlukan, serta menjadi sumber penting bagi penyediaan teknologi kecil dan menengah yang dimilikinya. Mantan Presiden Wahid pada waktu itu menegaskan pentingnya hubungan RI-China di masa mendatang, seperti tercermin dalam gagasannya tentang aliansi Indonesia, China, India, Singapura dan Jepang. Akan tetapi gagasan tersebut tidak ditunjukkan secara konkret akan pentingnya China dalam politik luar negeri yang ingin diciptakannya⁵. Dengan hanya menetapkan seorang Konsul Kehormatan RI di Shanghai sebagai resiprokal Konsul Jenderal RRC penuh di Surabaya merupakan keputusan yang kurang bernilai strategis dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia pada masa globalisasi sekarang ini.

Pimpinan baru China berhasil membagi China dalam “dua ekonomi”. Di daerah pantai dan terutama di *special economic zones*, berlaku kapitalisme pasar yang sangat bebas. Akan tetapi sektor BUMN dan daerah pedalaman masih dikuasai dan dikendalikan kuat oleh negara. Di lain pihak, petani pada umumnya sudah diberi kebebasan bertanam. Dengan kombinasi dua ideologi yang sebetulnya bertentangan, China dewasa ini menjadi superpower yang ekspor impornya sangat mempengaruhi ekonomi dunia, dan selama tiga dasawarsa ini PDB-nya sempat tumbuh sekitar

⁴ “Reinventing ASEAN” ibid.h.134; <http://www.vnagency.com.vn/Public/Readnews.asp?file>

⁵ Anthony L. Smith, “Gus Dur and the Indonesian Economy,” ISEAS, Singapore, 2001, h.59

9 persen setahun. Sikap pemerintah China ini terus diamati oleh seluruh dunia karena China merupakan ancaman (*threat*) sekaligus kesempatan (*opportunity*) bagi mereka. Pemerintah China sadar akan tanggung jawab internasionalnya dan tidak akan merusak ekonomi negara-negara berkembang dengan ekspor tekstil, elektronik dan produk industri lainnya yang sangat murah.⁶

Terhadap AS, China berjanji akan mengurangi ekspor barang yang sama. Tekstil dari China memang sudah menguasai pasar Amerika. AS menuduh China sengaja menekan nilai mata uangnya dengan mematok (*undervalued*) nilai tukarnya dengan US-dollar untuk mendorong ekspornya. China sampai sekarang menolak untuk mengapresiasi uangnya, tetapi berjanji untuk menerapkan pajak ekspor terhadap ekspor tekstilnya.⁷

Pada pemerintahan Presiden SBY ini, kerja sama kita dengan China diharapkan akan meningkat secara riil dengan dihasilkannya Deklarasi Kemitraan Strategis antara Indonesia dan China. Indonesia mengharapkan China sebagai pasar yang potensial bagi berbagai produk kita sekaligus sumber penting bagi kebutuhan kita akan produk teknologi kecil dan menengah, termasuk produk teknologi persenjataan yang kita perlukan.

Pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia

Politik luar negeri merupakan kebijakan negara untuk memperjuangkan kepentingan nasional terhadap dunia luar. Sasaran politik luar negeri sifatnya fleksibel, bukan memaksakan kemauan sendiri untuk mengamankan kepentingan nasional dengan merugikan pihak lain. Metoda politik luar negeri bukan menghindari kendala-kendala yang terdapat di dalamnya, melainkan mencari solusi dari

kendala-kendala itu melalui persuasi dan negosiasi.

Menghadapi konstelasi internasional yang berubah serta transformasi sosial politik di dalam negeri, perumusan dari pelaksanaan politik luar negeri Indonesia mau tidak mau perlu diperbaharui. Dalam era reformasi dan krisis multi-dimensional ini, politik luar negeri Indonesia diharapkan dapat memainkan setidaknya lima fungsi, yaitu membantu pemulihan ekonomi, membantu menjaga keutuhan territorial, memelihara lingkungan regional yang aman dan stabil, menumbuhkan rasa kebersamaan dalam masyarakat yang ter-pecah-pecah serta membangkitkan rasa kebanggaan pada masyarakat yang mulai kehilangan kepercayaan diri.⁸

Secara tidak langsung kerja sama luar negeri dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi siapa pesaing-pesaing, dan menganalisa persepsi berbagai pihak luar negeri (pemasok, pelanggan) mengenai produk dalam negeri dan berbagai keadaan dalam negeri yang segala sesuatunya dibutuhkan bagi penyusunan taktik-taktik persaingan dengan pihak luar. Tujuan menyiasati ini adalah memaksimalkan situasi saling menguntungkan serta menghindarkan situasi untung rugi dalam hubungan ekonomi. Identifikasi mengenai hal ini bertambah penting dengan semakin banyaknya kegiatan intra-regional yang bersifat jangka panjang seperti kerja sama antar bangsa dalam pembangunan kawasan bersama. Sebagaimana ekonomi, maka sebagian besar keuntungan kerja sama akan jatuh ke negara-negara industri. Secara alamiah ini memang tidak terhindarkan oleh karena keadaan negara industri yang sudah lebih maju. Namun apabila hal ini tidak dikoreksi maka akan ada kecenderungan jurang ekonomi antara negara industri dan negara berkembang

⁶M. Sadli, "Ekonomi Asia dan Posisi Indonesia", Kompas, 25 Mei 2005

⁷ ibid.

⁸ Ali Alatas, "Tatanan Politik Dunia Abad XXI" Kompas Juni 2000.

semakin lebar. Oleh karena itu dibutuhkan aturan permainan bukan hanya menyangkut hubungan ekonomi tetapi juga hubungan sosial, politik, kebudayaan dsb.nya.

Berdasarkan penjelasan di atas, di dalam pelaksanaan politik luar negerinya pemerintahan Presiden SBY mempunyai sasaran utama yang difokuskan pada Lingkaran Konsentris II yaitu kemitraan strategis dengan negara-negara tetangga di Selatan (Australia, Timor Timur dan Selandia Baru) dan negara-negara dunia ketiga lainnya melalui pertemuannya dengan kepala-kepala negara Asia-Afrika dalam forum Peringatan 50 tahun KAA, serta memperbaiki hubungan lebih erat dengan AS dan UE.

Kunjungan kenegaraan pertama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Australia pada awal April 2005, menandai kian pudarnya kekhawatiran historis Australia tentang ancaman dari Utara. Dari bantuan Australia di Nias, dan sebelumnya di Aceh, kita semakin yakin bahwa Australia telah memperlihatkan niat yang tulus terhadap Indonesia.⁹

Dalam perspektif hubungan RI-Australia sejak 1980-an terjadi hubungan pasang-surut antar kedua negara. Sekarang setelah hubungan ini dalam kondisi baik, bagaimanakah kita mengisinya secara produktif demi kemajuan dan kemanfaatan kedua pihak?

Presiden SBY ke Australia membicarakan peningkatan kerja sama dalam menangani terorisme dan kejahatan transnasional, serta ditandatanganinya latihan militer gabungan antar ke dua negara. Kesepakatan perjanjian pertahanan keamanan yang akan dicapai kedua negara berada dalam *frame work* perang internasional melawan terorisme.

Kekhawatiran Australia terhadap kelompok radikal terutama yang berada di Indonesia beralasan dengan meningkatnya profil negara itu dalam pentas internasional sebagai salah satu sekutu AS yang terlibat langsung dalam

perang Irak. Dalam isu ini, Australia berada dalam posisi *the coalition of willing* yang menginvasi Irak di luar persetujuan PBB. Sebaliknya Indonesia menolak tindakan seperti itu terutama karena adanya kesan perang melawan terorisme merupakan serangan terhadap umat Islam.

Peningkatan profil Australia ini berdampak pada meningkatnya ancaman keamanan dari kelompok radikal, termasuk kelompok jemaah Islamiyah yang dipercayai beroperasi di Indonesia.¹⁰ Oleh karena itu, diperolehnya jaminan dalam bentuk kerja sama keamanan dengan Indonesia merupakan prestasi tersendiri yang mampu diraih PM Howard.

Bagi Indonesia, kunjungan ini dimanfaatkan untuk menjelaskan keberatan-keberatan, seperti halnya *travel warning* yang dikeluarkan Deplu Australia sering didasarkan informasi yang sumir dan tidak menguntungkan citra Indonesia sehingga memukul industri pariwisata kita.

Apabila saling percaya antara RI-Australia dapat ditingkatkan, maka banyak bidang yang bisa dikembangkan seperti keamanan penerbangan sipil dan program perlindungan sosial. Bahkan kalau tahap yang ada sekarang ini masih dianggap sebagai bagian dari konsolidasi, maka ada program lainnya yang pasti bermanfaat tanpa menimbulkan kerumitan politik seperti program pertukaran ilmiah dan pengembangan teknologi. Pengalaman kita dalam menghadapi serentetan bencana alam bisa didiskusikan secara ekstensif dengan Australia. Sebagai negara yang sains dan teknologinya lebih maju, Australia punya banyak kapasitas untuk bekerjasama dengan Indonesia dalam penanggulangannya.

Selain upaya peningkatan hubungan bilateral, lawatan Presiden SBY juga mengangkat isu regional, khususnya yang berkaitan dengan masalah keikutsertaan

⁹ Kompas, 9 April 2005

¹⁰ Kompas, 12 April 2005

Australia dalam Komunitas Asia Timur (*East Asia Community/EAC*) yang akan menyelenggarakan KTT pertamanya pada akhir tahun ini di Kuala Lumpur.

Indonesia mendukung diikutsertakannya Australia dan negara-negara sekawasan lainnya dalam KTT Asia Timur yang merupakan kelanjutan KTT ASEAN +3 (Jepang, Korea Selatan dan China). Keikutsertaan Australia dalam KTT tersebut dinilai positif bagi perkembangan kawasan Asia Timur sekaligus memperkuat keberadaan ASEAN, meskipun ada kendala dari sikap Malaysia yang berpandangan bahwa Australia, Selandia Baru dan India tidak perlu diikutsertakan dalam KTT Asia Timur.¹¹ Hal inilah yang melatarbelakangi penolakan Deplu RI pada saat pertama kali ide pembentukan *East Asia Community* diusulkan oleh PM Mahathir. Indonesia khawatir kepentingan ASEAN akan terdesak oleh kepentingan negara-negara mitra yang lebih maju industrinya.

Pernyataan Presiden RI ini dapat memicu wacana segar menyangkut upaya menggerakkan kawasan ini dalam kerangka dinamika perkembangan global yang antara lain ditandai dengan terbentuknya blok-blok komunitas, seperti blok perdagangan bebas di Amerika Utara dan Eropa. Untuk kawasan Asia, pembentukan blok semacam itu masih banyak kendalanya karena begitu banyak perbedaan di wilayah Asia seperti bahasa, ras, kultur dsb.¹²

Kehadiran anggota baru seperti Australia dan Selandia Baru akan bisa meningkatkan *greget* dan tidak membuat pertemuan merupakan pengulangan pertemuan sebelumnya. Keikutsertaan mereka merupakan langkah

strategis untuk menegaskan posisi Indonesia yang ingin memperkuat ASEAN dan kerja sama ASEAN +3.¹³

Hubungan Indonesia dan Timor Leste dipererat dengan kunjungan Presiden SBY ke Timor Timur selama dua hari yang pada intinya adalah penegasan kembali penghormatan Indonesia atas kemerdekaan Timor Leste serta mengekspresikan sikap persahabatan untuk membangun kerja sama. Presiden SBY secara khusus mengatakan keinginannya untuk membuka jalur darat diantara kedua negara, khususnya di daratan Pulau Timor guna meningkatkan kerja sama ekonomi dan mempererat ikatan kebudayaan. Dalam pertemuannya dengan Presiden Xanana Gusmao telah diadakan penandatanganan kerja sama dalam upaya penyelesaian garis perbatasan kedua negara yang bertetangga dan beberapa masalah-masalah lain. Seperti kita ketahui negara baru berpenduduk 800.000 jiwa itu kini mengalami berbagai kesulitan, terutama di bidang ekonomi. Biaya operasional birokrasi pemerintahan masih bergantung pada bantuan asing. Disinilah Indonesia harus menangkap peluang yang ada untuk membantu Timor Leste.¹⁴

Hubungan Indonesia - AS pada pemerintahan presiden SBY ini mengalami peningkatan dengan kunjungan beliau ke Amerika Serikat pada akhir Mei 2005 ini. Presiden mempersiapkan secara serius guna mewujudkan apa yang merupakan rencana dan program pemerintahannya. Diantaranya kesungguhan bebenah dalam penegakan hukum yang menjamin kepastian dan keadilan, termasuk penegakan martabat dan hak asasi manusia. Demikian pula penegasan tindakan beliau terhadap pelaku tindak pidana korupsi di

¹¹ Pertemuan Puncak ini ingin difokuskan untuk membangun hubungan kerjasama ASEAN+3 dan merupakan bagian dari upaya pembentukan Komunitas Asia Timur yang menjadi impian mantan PM Malaysia Mahathir Mohamad.

¹² Sifat keanggotaan forum kerjasama perdagangan dan ekonomi tidak hanya berdasarkan ras, tetapi juga dari segi geografis.

¹³ Kompas, 9 April 2005

¹⁴ Indonesia tidak dapat begitu saja melupakan Timtim karena bagaimanapun sempat berada dalam pangkuan NKRI selama 24 tahun. Kepedulian sangat diperlukan saat ini.

berbagai instansi dan lingkungan. Presiden SBY pernah dipandang sebelah mata oleh Presiden Bush mengenai kemampuannya memberantas korupsi ketika bertemu di pertemuan APEC. Kini dengan langkah mantap dan kredibilitas cukup tinggi akan mendukung keberhasilan Presiden dalam kunjungannya ke AS guna meningkatkan hubungan bilateral berdasarkan saling menghormati dan saling percaya. Salah satu program konkret di bidang keamanan melalui peningkatan program tukar menukar pendidikan, pelatihan yang sifatnya militer ke militer. Program pelatihan militer akan direvitalisasi meskipun AS belum mencabut embargo pembelian persenjataan yang diterapkan ke Indonesia. Secara substansial memang tidak ada perubahan signifikan terhadap usaha pencabutan embargo. Embargo senjata memang masuk dalam legislasi AS sejak senat AS mengesahkan peraturan apropriasi bulan Nopember 2004, yang mengatur juga bantuan luar negeri untuk tahun fiskal 2005. Dalam legislasi tersebut ada lima kondisionalitas yang berkaitan dengan *Foreign Military Financing Program* atas bantuan yang bisa diberikan kepada Indonesia dan lisensi ekspor peralatan pertahanan (*lethal defense articles*) untuk TNI.¹⁵

Sejauh ini Presiden Bush telah mengeluarkan satu sertifikasi atas kondisionalitas bahwa pemerintah Indonesia dinilai telah kooperatif terhadap kasus penembakan dua warga AS yang semula diduga dilakukan oknum TNI, tetapi dari hasil penyelidikan TNI dan lembaga penyidik FBI ternyata dilakukan oleh anggota Organisasi Papua Merdeka bernama Anthonius Wamang. Meskipun Bush mendukung upaya normalisasi hubungan militer,

sebagian ganjalan masih ada di Kongres AS yang punya penilaian berbeda tentang Indonesia. Oleh karena itu pemerintahan Bush dan SBY sepakat membentuk *Indonesian-US Security Dialogue* serta *Bilateral Defense Dialogue* sebagai sarana normalisasi hubungan militer kedua negara.

Pembicaraan tingkat tinggi antara SBY dan Bush tersebut masih menyisakan tanda tanya besar apakah akan menghasilkan terobosan nyata atau tidak? Faktor-faktor yang menentukan apakah embargo militer akan jalan terus atau tidak antara lain seperti sudah dijelaskan diatas adalah penyelesaian mengenai pelanggaran HAM di Timor Leste.

Faktor kedua adalah kepentingan strategis-keamanan AS pasca 11 September. Hal ini bisa menjadi pendukung bagi Indonesia guna dibukanya kembali bantuan militer AS, dengan adanya penilaian bahwa embargo militer secara startegis tidak akan menguntungkan AS dalam menghadapi terorisme internasional. Dengan adanya embargo militer itu berakibat lemahnya postur TNI dan akan menciptakan instabilitas baru di Asia Tenggara. Gagasan ini salah satunya didukung oleh mantan Menteri Pertahan AS dan Dubes AS di Jakarta Paul Wolfowitz yang meyakini bahwa embargo tidak akan menghasilkan peningkatan situasi HAM secara langsung di Indonesia. Yang perlu dilakukan adalah melanjutkan proses demokratisasi yang terus berjalan berdasarkan inspirasi yang dapat diperoleh dari sistem politik di AS.

Faktor ketiga adalah penghentian bantuan persenjataan oleh AS tidak hanya merugikan Indonesia tetapi juga merugikan perusahaan-perusahaan AS. Para pemasok persenjataan AS ke Indonesia sangat dirugikan dengan adanya embargo ini karena harus kehilangan milyaran rupiah, dan menguntungkan pemasok dari luar AS.

Oleh karena itu supaya kita tidak terlalu tergantung dengan AS perlu dirancang industri pertahanan kita sehingga menjadi bagian integral

¹⁵ Dalam legislasi AS secara tegas, meminta Menteri Pertahanan melakukan tindakan terhadap anggota TNI pelaku pelanggaran HAM berat dan ada proses peradilan terhadap mereka, serta TNI bekerjasama dengan kejaksaan dan peradilan serta *United Nations East Timor Serious Crime Unit*. Menteri Pertahanan juga diminta melakukan transparansi public atas audit penerimaan dan pembelanjaan TNI.

kebijakan pertahanan Indonesia. Paling tidak industri pertahanan menjadi pendukung utama bagi terpenuhinya persyaratan minimal dari suatu pertahanan.¹⁶

Makna 50 Tahun Konferensi Asia Afrika Bagi Indonesia

Keputusan Konperensi Asia Afrika di Bandung 50 tahun lalu dirumuskan dalam Dasasila Bandung. Dari 10 butir keputusan Dasasila Bandung¹⁷ kalau kita kaji, tujuan pokok konperensi itu telah berhasil. Hanya bangsa Palestina-lah yang belum merdeka dan berdaulat.

Maka pada KAA kali ini negeri Palestina menjadi fokus perhatian politik untuk membangkitkan momentum yang berdaya efektif bagi kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Palestina.

Peringatan 50 tahun KAA yang diadakan di Bandung dan didahului KAA Summit pada tanggal 22-23 April 2005 di Jakarta telah menguak perspektif baru. Kita memperingati peristiwa heroik bangsa-bangsa Asia Afrika, kita menangkap makna sejarah dan apinya, hal ini berarti dengan bekal KAA 50 tahun lalu, kita menatap masa kini dan masa depan.

Ketertinggalan dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, pengembangan sosial ekonomi, budaya serta pembangunan masyarakat madani merupakan sasaran yang tidak bisa ditunda. Itulah tantangan sejarah, bidang-bidang inilah arena pergulatan dan perjuangan setiap negara, terutama negara-negara Asia Afrika. Kita optimis, sebab

kenyataannya di antara negara Asia Afrika semakin bertambah jumlah negara yang mau dan mampu membuat langkah maju. Langkah itu bahkan mulai menjadi pusat perhatian dunia seperti kemajuan yang dicapai China dan India.

Bagi kita Indonesia, peringatan 50 tahun KAA harus kita sikapi sebagai tonggak penting bagi bangsa ini untuk maju melangkah. Harus kita akui, sebelumnya ada keraguan dan pesimisme untuk mampu menyelenggarakan dengan aman dan sukses. Hal ini karena kita sedang menghadapi berbagai persoalan ruwet di dalam negeri, di samping kita sepertinya selalu salah langkah dalam setiap upaya mencari jalan ke luar.

Peringatan yang diikuti lebih dari 100 pemimpin negara Asia-Afrika itu tidak saja berlangsung aman, tetapi telah berhasil pula merajut kemitraan baru diantara bangsa-bangsa di kedua benua. Kemitraan baru itu akan benar-benar terwujud atau sebaliknya, seperti kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sejarah jualah yang akan membuktikannya.

Agenda utama KAA membahas dan meluncurkan Deklarasi Kemitraan Strategis Baru di Asia Afrika (NAASP)¹⁸, yang antara lain berisi tentang reformasi sistem PBB dan lembaga multilateral lainnya untuk memberi kesempatan negara berkembang memperjuangkan kepentingan mereka dengan cara yang lebih adil dan partisipatif. Misalnya, dalam pertemuan-pertemuan G-7 seyogyanya negara berkembang terwakili sebab dalam dunia yang saling tergantung keputusan-keputusan G-7 akan selalu memberi pengaruh bagi negara-negara berkembang.¹⁹ Tetapi yang pasti, KAA merupakan jawaban yang tidak saja mengubur

¹⁶ Kompas, 28 Mei 2005

¹⁷ Butir-butir dalam Dasasila Bandung diantaranya adalah: Kemerdekaan, kedaulatan, keutuhan teritorial bagi setiap bangsa dan negara; Pemecahan konflik secara damai sesuai dengan Piagam PBB; Hak asasi serta asas perlindungan hukum yang tidak kenal perbedaan warna kulit; Penghindaran dan pengecaman terhadap kerjasama blok-blok negara atas dasar ideologi dalam persaingan dan konflik perang dingin; Pembangunan dan penyelenggaraan kesejahteraan warga bangsa dan bangsa yang merdeka; Masalah keadilan social harus merupakan jembatan bagi jurang perbedaan negara kaya dan miskin.

¹⁸ Program-program konkret dalam unsur NAASP antara lain peningkatan sumber daya manusia dan kapasitasnya, memperkuat sistem perdagangan multilateral, meningkatkan kerjasama perdagangan, industri, investasi dan keuangan. Kemitraan baru Asia-Afrika akan terdiri dari tiga pilar, yaitu antarpemerintah, antar subregional dan antarmasyarakat.

¹⁹ Media Indonesia, 25 April 2005

keraguan terhadap diri sendiri, tetapi juga membangkitkan kembali spirit untuk meraih kembali sesuatu yang telah hilang.

KAA juga menjadi amat penting dan akan selalu dikenang karena bertemunya berbagai pemimpin dari negara-negara yang tengah dilanda ketegangan, seperti antara Jepang dan China, India dan Nepal, Korea Utara dan Korea Selatan dan antara Malaysia dan Indonesia dengan berbagai permasalahan antara kedua negara.

Hal ini berarti ditengah berbagai persoalan dalam negeri yang sangat banyak, bangsa kita masih mempunyai manfaat bagi bangsa-bangsa lain. Dari sini kita harus teguh berkeyakinan bahwa kita pasti akan bisa melangkah ke depan dengan mantap. KAA membuktikan bahwa rakyat Indonesia mampu membuktikan pada dunia bahwa kita bisa bersama dan bersatu menciptakan keamanan dan kesuksesan melalui perhelatan ini.

Usai KAA, Indonesia memanfaatkan momentum ini dengan menjalin kemitraan strategis dengan China. Pertemuan Presiden RI dengan Presiden China Hu Jintao menghasilkan suatu Deklarasi Kemitraan Strategis yang ditandatangani pada tanggal 25 April 2005.²⁰ Kemitraan Strategis ini akan berupa hubungan yang tidak memihak dan tidak tertutup yang ditujukan untuk mempromosikan perdamaian, stabilitas dan kemakmuran kedua negara beserta rakyatnya. Kemitraan Strategis ini akan menjadi sendi penting dalam memperkuat kemitraan strategis ASEAN-China serta menjadi komponen penting dalam memperkuat kerja sama Selatan-Selatan antar negara berkembang.

Kemitraan ini difokuskan untuk memperkuat kerja sama politik dan keamanan, memperdalam kerja sama ekonomi dan pembangunan, meningkatkan kerja sama social budaya dan memperluas hubungan non-pemerintah.

Penandatanganan deklarasi tersebut merupakan perkembangan lanjutan atas kesepakatan yang dicapai kedua negara di sela-sela pertemuan puncak APEC di Santiago, Cile pada November 2004.²¹

Kita harus menangkap peluang ini dengan sebaik-baiknya dan dapat merealisasikannya. China yang pernah terseok-seok dengan sistem ideologi komunisme, kini bangkit percaya diri membangun perekonomian negerinya. Hal ini harus kita contoh sebagai negara yang punya konsep pembangunan yang sudah *on the right track*.

Bukan hanya ide dan proses pembentukan kemitraan strategis itu menarik, tetapi situasi yang melingkupinya juga tepat. Secara regional, kesepakatan kemitraan strategis Indonesia muncul pada momentum tepat, lebih-lebih setelah India-China membentuk persahabatan dan kerja sama ekonomi.²²

Momentum KAA juga digunakan oleh Jepang-China untuk bertemu menjalin kembali hubungan kedua negara yang menegang beberapa waktu ini yang dipicu oleh pengesahan buku pelajaran yang isinya dianggap menutupi kekejaman Jepang selama masa pendudukan di wilayah Asia khususnya China dan Korea.

Masa Depan Diplomasi Indonesia

Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang memenangkan pemilihan umum secara langsung dan pertama di Indonesia tahun 2004 berupaya menghilangkan citra Indonesia yang kurang baik di luar negeri akibat berbagai

²⁰ Sembilan kerjasama itu antara lain, bidang industri strategis yang berhubungan dengan sistem persenjataan darat, laut dan udara; penegakan hukum dalam menghadapi kejahatan transnasional dan terorisme. Juga disepakati kerjasama pembebasan visa untuk paspor dinas dan diplomatic; infrastruktur dan sumber daya alam; hibah yang berhubungan dengan ekonomi dan teknologi; pengaturan badan geofisika, gempa bumi dan tsunami serta palang merah kedua negara.

²¹ Kompas, 28 April 2005

²² Kedua negara China dan India bertekad menyelesaikan persengketaan perbatasan sejauh 3.500 kilometer untuk melapangkan jalan bagi peningkatan kerjasama bidang ekonomi dan diplomatik.

faktor internal seperti stabilitas keamanan,transparansi, konsistensi kebijakan (termasuk penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan yang kondusif).

Diperlukan suatu upaya diplomasi yang komprehensif dan terpadu dengan lebih menonjolkan transformasi politik yang telah dialami Indonesia sebagai identitas baru yang membedakannya dengan era sebelumnya yang otoriter dan militeristik. Pada masa Orde Baru perimbangan kekuatan politik dan kekuasaan adalah masa “*executive heavy*”, akan tetapi pada masa pemerintahan saat ini keseimbangan lebih kepada “*partikroasi*”, di mana legislatif lebih dominan dari pada eksekutif, sehingga perencanaan pembangunan nasional disesuaikan dengan perkembangan baru ini.²³

Identitas Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dan terbesar di kalangan dunia Islam, dengan masyarakat plural dan Islam moderat serta sistem ekonomi terbuka perlu dipromosikan secara lebih luas untuk menetralkan citra buruk yang cenderung mendominasi pemberitaan tentang Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan Pemilu legislatif dan Presiden langsung yang paling demokratis selama Indonesia merdeka. Disamping itu, dalam hubungan internasional yang diwarnai *complex interdependence* diperlukan pula kemitraan yang lebih luas antara pemerintah dan unsur-unsur di luar pemerintah dengan melibatkan banyak aktor di luar negara.

Faktor lain yang menyangkut citra Indonesia dimata internasional adalah penghargaan terhadap HAM yang mencatat rekor terburuk selama pemerintahan Orde Baru. Untuk itu diperlukan suatu tekad dan langkah nyata dari pemerintah saat ini untuk memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap HAM. Terkait dengan ini adalah upaya penegakan hukum dan penyelesaian yang adil terhadap

pelanggaran HAM dimasa lalu yang merupakan tantangan berat bagi kredibilitas pemerintah saat ini.

Pelaksanaan diplomasi memerlukan pengetahuan yang mantap tentang masalah yang dihadapi dan kemampuan berkomunikasi dengan penguasaan bahasa yang baik. Berdasarkan penguasaan tersebut akan terbuka kemungkinan-kemungkinan dengan spektrum yang lebih luas bagi politik luar negeri kita di masa depan untuk memperjuangkan kepentingan kita dalam era globalisasi saat ini.

Multilateralisasi hubungan antar negara menuntut suatu organisasi Departemen Luar Negeri yang menyesuaikan diri secara struktural dengan kemajemukan hubungan yang semakin meningkat dan terintegrasi. Proses politik, ekonomi, sosial dan keamanan berubah dengan cepat, demikian pula dengan teknologi sebagai instrumen sehingga mempengaruhi manusia dan sikapnya yang berubah dengan cepat pula. Perubahan itu terasa di dunia bisnis dan diplomasi internasional. Tantangan yang kita hadapi adalah memahami perubahan-perubahan tersebut sehingga kita dapat memanfaatkannya bagi keuntungan kita sendiri dan yang akan mempengaruhi masa depan kita.

Kita hidup dalam suatu dunia yang berlandaskan teknologi dan bisnis. Di samping itu kita juga hidup dalam suatu lingkungan yang berlandaskan demokrasi, *civil society*, hak asasi manusia dan *good governance* dalam suatu proses pembangunan yang berkelanjutan. Ilmu pengetahuan, teknologi dan demokrasi merupakan kunci masa depan.

Dengan asumsi diatas, politik luar negeri kita tidak dapat lagi dihadapi dengan pendekatan politik, ekonomi, sosial-budaya, keamanan secara terpisah-pisah. Ia harus didekati secara terintegrasi dan hal ini memerlukan suatu sikap yang baru pula, yakni dengan melihat perkembangan-perkembangan nasional, regional dan internasional sebagai suatu rangkaian kejadian dan perkembangan yang terintegrasi. Diplomasi yang baru ini perlu

²³ Ali Alatas, “Tatanan Politik Luar Negeri Indonesia Abad XXI”, Kompas, Juni, 2000

ditunjang secara organisatoris berdasarkan pembagian yang lebih fungsional sebagaimana struktur Deplu saat ini. Diharapkan implementasi penerapannya lebih dapat menampung pendekatan permasalahan multilateral atas dasar pendekatan lintas bidang sebagai pedoman bagi pengembangan langkah-langkah diplomasi antara Indonesia dengan negara-negara lain yang sudah terintegrasi secara regional dan multilateral maupun yang belum.

Di samping itu, Deplu juga menerapkan kebijakannya melalui forum “*total diplomacy*,”²⁴ di mana forum tersebut melibatkan berbagai lapisan, meliputi departemen-departemen terkait, DPR, masyarakat, kelompok NGO dll, dengan harapan masukan-masukan dari forum ini dapat melengkapi kebijakan yang diambil Deplu/pemerintah sehingga diperoleh hasil yang maksimal. Sebagai contoh, dalam rangka pemulihan perekonomian kita maka Deplu dengan Menko Perekonomian, Departemen Perdagangan dan departemen terkait lainnya duduk bersama-sama untuk mencapai kebijakan yang semaksimal mungkin di bidang penanaman modal asing. Dalam hal ini, peningkatan kemampuan *public relation* secara keseluruhan serta profesionalisme kalangan diplomat sangat diperlukan.

Agar politik luar negeri dapat mencerminkan identitas dan prioritas nasional, maka nilai-nilai demokrasi dan HAM yang sekarang menjadi tema utama politik dalam negeri sebaiknya ikut dijadikan sebagai nilai-nilai yang mendasari politik luar negeri Indonesia di masa datang.

Penutup

Di dalam menghadapi dinamika politik yang berkembang, Indonesia sudah cukup tanggap terhadap kendala-kendala baik yang

berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Secara umum pemerintah Indonesia memahami *trend* yang terjadi serta kemungkinannya di masa depan. Hal ini dapat dibuktikan melalui telaahan yang bersifat strategis, introspeksi dan reaktualisasi terhadap kegiatan politik serta langkah-langkah yang telah diambil dalam menghadapi setiap permasalahan politik berskala nasional maupun internasional.

Namun bila dihadapkan kepada kepentingan nasional yang lebih luas yang berkaitan dengan berbagai kepentingan internasional, respon Indonesia kurang optimal dan masih perlu adanya perbaikan atau perubahan sikap politik. Indikator yang terlihat dalam implementasinya antara lain:

- 1) Indonesia lebih bersifat reaktif terhadap kasus yang terjadi dan cara-cara penanganan yang kurang memperhatikan *trend* internasional, yang mau tidak mau harus kita ikuti sebagai konsekuensi logis dari era globalisasi.
- 2) Intervensi politik dari luar negeri yang mempunyai kepentingan tertentu terhadap Indonesia kurang bisa diantisipasi secara dini. Hal ini disebabkan terbatasnya kemampuan menyerap dan menganalisa informasi serta lemahnya diplomasi luar negeri kita.
- 3) Indonesia harus menangkap peluang yang ada dalam kemitraan strategis yang merupakan kebijakan luar negeri saat ini. Bagaimana kesiapan kita merealisasikan kemitraan pada tingkat operasional secara optimal?

Kebijakan Pemerintah menghadapi dinamika politik yang berkembang di dalam negeri dirasakan masih kurang, dimana pemerintah sering dianggap terlalu campur tangan dan melakukan rekayasa politik sehingga terkesan membodohi dan mengekang masyarakat. Demokratisasi akibat globalisasi juga perlu diwaspadai karena hal tersebut sangat rawan terhadap kondisi masyarakat Indonesia yang heterogen, dan bila dipaksakan hal itu dapat menimbulkan disintegrasi bangsa.

²⁴ Marty Natalegawa, “Polugri dalam Pemulihan Ekonomi Nasional” Seminar P2P-LIPI, September 2002

Menghadapi dinamika politik dari luar negeri, yang dirasakan masih perlu dibenahi antara lain adalah kualitas aktor politik (diplomat) dan masih kurangnya aktor non pemerintah yang terlibat dalam hubungan luar negeri. Disamping itu, kegiatan diplomasi dirasakan masih kurang intensif dan kurang terpadu dengan kepentingan aspek lain (ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya dan keamanan) sehingga kurang maksimal mendukung keberhasilan politik luar negeri kita. Oleh karena itu kebijakan “*total diplomacy*” yang telah dimulai pada pemerintahan terdahulu perlu ditingkatkan, antara lain melalui penggalangan terhadap organisasi-organisasi penting di dunia, termasuk NGO’S tertentu yang selalu memojokkan Indonesia. Demikian juga kerja sama di bidang sosial dan budaya dengan negara-negara yang tidak/kurang senang terhadap Indonesia dengan melibatkan kalangan swasta maupun masyarakat umum (*people to people diplomacy*). Peran dan dukungan pemerintah dalam kerja sama ini sangat diperlukan untuk menunjang kepentingan politik luar negeri.

Potensi masyarakat Indonesia di luar negeri baik bersifat perorangan maupun organisasi walaupun kecil perlu dilibatkan secara terpadu dan optimal untuk mengantisipasi, mengakomodasikan, menangkal dan menangkis terhadap setiap kemungkinan intervensi politik serta mampu mendukung keberhasilan kebijakan politik luar negeri.

Di samping itu, dalam era globalisasi Indonesia perlu lebih mengintensifkan keterlibatannya dalam forum-forum internasional seperti ASEAN, ASEAN+3, APEC, dan organisasi keuangan internasional agar memiliki *bargaining power* terhadap negara-negara besar terutama AS yang selama ini menguasai PBB dan IMF.

Presiden SBY sebagaimana kemunculannya sebagai kandidat presiden yang sukses, berusaha menggunakan karisma

pribadinya dengan mengambil peran lebih menonjol di dalam melaksanakan politik luar negerinya. Dengan melakukan pendekatan kepada negara mitra dialog guna meraih kepercayaan luar negeri akan keseriusannya di dalam setiap komitmennya.

Serangkaian kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengawali pemerintahannya merupakan perwujudan upayanya memperkuat kerja sama dengan negara-negara yang berada dalam Lingkaran Konsentris II meliputi Australia, Selandia Baru dan Timor Timur. Sementara pendekatan dengan ASEAN yang merupakan Lingkaran Konsentris I telah dilakukan beberapa waktu yang lalu dengan kunjungannya ke Singapura dan Malaysia yang ditindaklanjuti dengan kunjungan Wapres Yusuf Kalla, mengingat cukup seriusnya permasalahan yang ada diantara kedua negara seperti: *illegal logging*, TKI dan permasalahan perbatasan kasus Ambalat dengan Malaysia serta peningkatan perdagangan/investasi dan kelanjutan pembahasan mengenai perjanjian ekstradisi dengan pihak Singapura.

Namun kesuksesan dari kunjungan tersebut harus dibarengi dengan kerja keras untuk memanfaatkan secara optimal peluang dari setiap kerja sama karena secara regional dan global situasinya sangat kondusif untuk mendorong kemitraan strategis.

Tantangan terbesar bagi Indonesia adalah bagaimana kita bebenah diri agar mampu mengambil manfaat dari setiap bentuk kerja sama dan kemitraan dengan negara lain.

Penyelenggaraan peringatan 50 tahun KAA merupakan tonggak penting bagi Indonesia sebagai tuan rumah untuk memulihkan citra Indonesia ditengah masyarakat bangsa-bangsa di dunia. Dengan menggelorakan kembali semangat KAA ditengah konstelasi politik dunia yang telah berubah ternyata masih relevan untuk menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi oleh negara-negara Asia dan Afrika saat ini.

Daftar Pustaka

- Alatas, Ali, "Tatanan Politik Dunia Abad XXI," Kompas, Juni 2000
- Anwar, Dewi Fortuna, "Indonesia: foreign Policy and Domestic Politics", ISEAS, Singapore 2003
- L. Smith, Anthony, "Gus Dur and the Indonesian Economy," ISEAS, Singapore, 2001.
- Natalegawa, Marty, "Polugri dalam Pemulihan Ekonomi Nasional", Workshop, P2P-LIPI, 2002
- "*Reinventing ASEAN*", ISEAS, Singapore, 2001.
- Sadli, M, "Membangun Kemandirian Ekonomi Indonesia dalam Era Globalisasi," Seminar Nasional, P2E-LIPI, Agustus 2002
- Pangestu, Mari, "Indonesia in a Changing World Environment, Multilaterim vs Regionalism", Indonesian Quarterly, vol XXIII, no.2, CSIS, Jakarta, 1995.
- <http://business-times.asia.com.sg/views/story/html>
- <http://www.vnagency.com.vn/Public/Readnews.asp?file>
- Detikcom, 9 Mei 2005
- Kompas, 9, 12, 25 April, 2005
- Kompas, Mei, 2005
- Media Indonesia, 25 April, 2005